

**PERATURAN DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 01 TAHUN 2020**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI APB DESA  
TA 2019**



**PEMERINTAH DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2020**



KEPALA DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA MUTIH KULON  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUTIH KULON

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun 2019;
12. Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON  
dan  
KEPALA DESA MUTIH KULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Realisasi Pendapatan Desa       | Rp 2.289.302.077        |
| 2. Realisasi Belanja Desa          | <u>Rp 2.294.097.168</u> |
| Realisasi Surplus/Defisit          | (Rp 4.795.091)          |
| 3. Realisasi Pembiayaan            |                         |
| a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan | Rp 26.556.387           |

b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	Rp _____	0
Realisasi Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp	26.556.387
SILPA/Silpa Tahun Berjalan	Rp	21.761.296

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Realisasi APB Desa
- b. Catatan Atas Laporan Keuangan
- c. Rincian Aset Tetap Desa
- d. Realisasi Kegiatan Akhir Tahun
- e. Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang Masuk Ke Desa

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dicatat dan didokumentasikan dalam Register Peraturan Desa.

Agar setiap warga desa mengetahuinya memerintahkan pencatatan dan pendokumentasian Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Register Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Mutih Kulon  
pada tanggal 15 Januari 2020



Diundangkan di : Mutih Kulon

Pada Tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DESA MUTIH KULON

IZZATUN NIMAH, SE

LEMBARAN DESA MUTIH KULON TAHUN 2019 NOMOR 1

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

---

- I. Laporan Realisasi APBDesa
  - II. Catatan Atas Laporan Keuangan
    - A. Informasi Umum
    - B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
    - C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
      - 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
      - 2. Pendapatan Asli Desa
      - 3. Dana Desa
      - 4. Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah
      - 5. Alokasi Dana Desa
      - 6. Bantuan Keuangan Propinsi
      - 7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
      - 8. Pendapatan Lain lain
      - 9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
      - 10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
      - 11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
      - 12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
      - 13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
      - 14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
      - 15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
      - 16. Pembiayaan
      - 17. Aset Desa
      - 18. Penyertaan Modal Desa
- Lampiran I.1 - Rincian Aset Tetap Desa

**Lampiran II :**

Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun  
Laporan Kekayaan Milik Desa

**Lampiran III :**

Program Sektor, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa

**I. LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

URAIAN	Ref	Anggaran Rp	Realisasi Rp	(Lebih)/ kurang Rp
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C.2	183.950.000	184.880.000	- 930.000
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	1.335.519.000	1.335.519.000	-
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	52.936.326	52.936.326	-
Alokasi Dana Desa	C.5	434.985.000	434.985.000	-
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	255.000.000	255.000.000	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	20.608.000	20.608.000	-
Pendapatan Lain lain	C.8	5.221.000	5.373.751	- 152.751
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		2.288.219.326	2.289.302.077	- 1.082.751
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	558.780.013	543.833.668	14.946.345
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	1.534.974.700	1.533.482.500	1.492.200
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	C.11 dan C15	110.270.000	108.621.000	1.649.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	104.930.000	104.865.000	65.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	5.821.000	3.295.000	2.526.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		2.314.775.713	2.294.097.168	20.678.545
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		- 26.556.387	- 4.795.091	- 21.761.296
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		26.556.387	26.556.387	-
Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		26.556.387	26.556.387	-
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>		-	21.761.296	- 21.761.296

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

## II. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Mutih Kulon Kecamatan, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019

### A Informasi Umum

Pemerintah Desa Mutih Kulon merupakan Desa di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Sesuai dengan Peraturan Desa No. 1 tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mutih Kulon Tahun Anggaran 2019 Tanggal Januari 2019, saat ini Struktur Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari:

1. Kepala Desa : Inwanul Falah
2. Sekretaris Desa : Izzatun Ni'mah,SE
3. Bendahara Desa : Siti Romlah, S.Pd.I

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl. Inspeksi Pengairan No. 1 , Desa Mutih Kulon, Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

### B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

### C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran

#### 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2019	-	21.761.296
Mutasi Potongan Pajak sbb :		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	-	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	113.300.014	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	113.300.014	-
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		-
<b>Saldo Kas per 31 Desember 2019</b>		<b>21.761.296</b>

#### 2. Pendapatan Asli Desa

<b>Pendapatan Asli Desa terdiri dari:</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih/ kurang</b>
a. Hasil Usaha	-	-	-
b. Hasil Aset	181.000.000	182.330.000	- 1.330.000
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	-
d. Lain-lain PADes yang sah	2.950.000	2.550.000	400.000
<b>Jumlah</b>	<b>183.950.000</b>	<b>184.880.000</b>	<b>- 930.000</b>

#### 3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

<b>Tahap</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih/ kurang</b>
Tahap 1	267.103.800	267.103.800	-
Tahap 2	534.207.600	534.207.600	-
Tahap 3	534.207.600	534.207.600	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.335.519.000</b>	<b>1.335.519.000</b>	<b>-</b>

#### 4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

Tahap	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Bagian dari hasil pajak Daerah	45.240.655	45.240.655	-
Bagian dari hasil Retribusi Daerah	7.695.671	7.695.671	-
<b>Jumlah</b>	<b>52.936.326</b>	<b>52.936.326</b>	-

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Tahap	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Tahap 1	260.991.000	260.991.000	-
Tahap 2	173.994.000	173.994.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>434.985.000</b>	<b>434.985.000</b>	-

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut:

Rincian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000	30.000.000	-
Ketahanan	20.000.000	20.000.000	-
KPMD	5.000.000	5.000.000	-
Pembangunan Sarana Prasarana	200.000.000	200.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>255.000.000</b>	<b>255.000.000</b>	-

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Rincian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Bantuan Keuangan Kabupaten	20.608.000	20.608.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.608.000</b>	<b>20.608.000</b>	-

8. Pendapatan Lain-lain

Rincian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Lain-lain pendapatan yang sah	5.221.000	5.373.751	- 152.751
<b>Jumlah</b>	<b>5.221.000</b>	<b>5.373.751</b>	- <b>152.751</b>

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Belanja Pegawai	326.026.832	324.464.016	1.562.816
Belanja Barang & Jasa	224.653.181	212.419.652	12.233.529
Belanja Modal	8.100.000	6.950.000	1.150.000
<b>Jumlah</b>	<b>558.780.013</b>	<b>543.833.668</b>	<b>14.946.345</b>

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	125.420.000	125.340.000	80.000
Belanja Modal	1.409.554.700	1.408.142.500	1.412.200
<b>Jumlah</b>	<b>1.534.974.700</b>	<b>1.533.482.500</b>	<b>1.492.200</b>

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	110.270.000	108.621.000	1.649.000
<b>Jumlah</b>	<b>110.270.000</b>	<b>108.621.000</b>	<b>1.649.000</b>

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	104.930.000	104.865.000	65.000
<b>Jumlah</b>	<b>104.930.000</b>	<b>104.865.000</b>	<b>65.000</b>

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa  
Selama tahun anggaran 2019, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	5.821.000	3.295.000	2.526.000
<b>Jumlah</b>	<b>5.821.000</b>	<b>3.295.000</b>	<b>2.526.000</b>

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi  
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
<b>Belanja Pegawai</b>			
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	253.200.000	253.200.000	-
Tunjangan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan Kepala	40.426.832	38.864.016	1.562.816
Tunjangan Purna Tugas/Pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
Tunjangan Pelaksana Tugas Perangkat DDesa	-	-	-
Tunjangan BPD dan anggotanya	32.400.000	32.400.000	-
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	131.319.649	122.923.000	8.396.649
Belanja Jasa Honorarium	86.112.000	84.787.000	1.325.000
Belanja Perjalanan Dinas	62.075.000	59.970.000	2.105.000
Belanja jasa Sewa	1.300.000	1.300.000	-
Belanja Operasional perkantoran	44.998.793	44.395.152	603.641
Belanja Pemeliharaan	17.709.739	17.291.500	418.239
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	227.579.000	223.874.000	3.705.000
<b>Belanja Modal</b>			
Belanja Modal pengadaan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	58.561.500	57.365.000	1.196.500
Belanja Modal Kendaraan	60.560.000	60.560.000	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.691.350	145.691.350	-

Belanja Modal Jalan	488.606.250	488.606.250	-
Belanja Modal Jembatan	75.961.600	75.961.600	-
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	556.098.300	556.078.300	20.000
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	32.175.700	30.830.000	1.345.700
<b>Jumlah</b>	<b><u>2.314.775.713</u></b>	<b><u>2.294.097.168</u></b>	<b><u>20.678.545</u></b>

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
<b>Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa</b>			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	481.350.401	477.366.168	3.984.233
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	16.409.739	14.841.500	1.568.239
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.424.705	5.424.000	705
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.313.168	32.920.000	9.393.168
Sub Bidang Pertanahan	13.282.000	13.282.000	-
Jumlah	<u>558.780.013</u>	<u>543.833.668</u>	<u>14.946.345</u>
<b>Bidang Pembangunan Desa</b>			
Sub Bidang Pendidikan	134.551.500	134.295.000	256.500
Sub Bidang Kesehatan	59.170.000	59.090.000	80.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.019.154.400	1.017.998.700	1.155.700
Sub Bidang Kawasan Permukiman	322.098.800	322.098.800	-
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	-	-	-
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
Sub Bidang Pariwisata	-	-	-
Jumlah	<u>1.534.974.700</u>	<u>1.533.482.500</u>	<u>1.492.200</u>
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	12.542.000	12.492.000	50.000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	68.228.000	67.629.000	599.000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	11.500.000	10.500.000	1.000.000

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.000.000	18.000.000	-
Jumlah	<u>110.270.000</u>	<u>108.621.000</u>	<u>1.649.000</u>
<b>Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.675.000	50.650.000	25.000
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.300.000	20.300.000	-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	33.955.000	33.915.000	40.000
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-	-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-
Jumlah	<u>104.930.000</u>	<u>104.865.000</u>	<u>65.000</u>
<b>Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.549.624	645.000	1.904.624
Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000	2.000.000	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	1.271.376	650.000	621.376
Jumlah	<u>5.821.000</u>	<u>3.295.000</u>	<u>2.526.000</u>

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	21.761.296	21.761.296	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Selisih Pembiayaan	<u>21.761.296</u>	<u>21.761.296</u>	<u>-</u>
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	26.556.387	26.556.387	-
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-
Jumlah	<u>26.556.387</u>	<u>26.556.387</u>	<u>-</u>
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	-	-	-
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

17 Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

Jenis Aset	Th 2018	Th 2019	Penambahan/ pengurangan
Tanah	-	-	-

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	21.013.000	57.365.000	36.352.000
Kendaraan		60.560.000	60.560.000
Gedung dan Bangunan	190.256.000	145.691.350	- 44.564.650
Jalan	860.720.500	488.606.250	- 372.114.250
Jembatan	-	75.961.600	75.961.600
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	-	556.078.300	556.078.300
Jaringan/Instalasi	-	-	-
Aset Tetap lainnya	41.499.500	30.830.000	- 10.669.500
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.113.489.000</b>	<b>1.415.092.500</b>	<b>301.603.500</b>

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran I.1

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Penambahan/ pengurangan</b>
BUMDes AL-MAULANA	20.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.000.000</b>	-	-

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MUTIH KULON  
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
		( Rp )	( Rp )	( Rp )
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>183.950.000,00</b>	<b>184.880.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>
1.1.1.	Hasil Aset Desa			
	Hasil Lelang	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
	Pasar Desa	6.000.000,00	7.330.000,00	-1.330.000,00
1.1.2.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa	2.950.000,00	2.550.000,00	400.000,00
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.099.048.326,00</b>	<b>2.099.048.326,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	Dana Desa	1.335.519.000,00	1.335.519.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	52.936.326,00	52.936.326,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	434.985.000,00	434.985.000,00	0,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	20.608.000,00	20.608.000,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>5.221.000,00</b>	<b>5.373.751,00</b>	<b>-152.751,00</b>
1.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	4.521.000,00	4.521.000,00	0,00
1.3.2.	Bunga Bank	700.000,00	852.751,00	-152.751,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.288.219.326,00</b>	<b>2.289.302.077,00</b>	<b>-1.082.751,00</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			<b>0,00</b>
<b>2.1.</b>	<b><u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u></b>	<b>558.780.013,00</b>	<b>543.833.668,00</b>	<b>14.946.345,00</b>
2.1.1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	31.200.000	31.200.000	0,00
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	222.000.000	222.000.000	0,00
	Tunjangan Sosial dan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.426.832	38.864.016	1.562.816,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa			
	Belanja ATK dan Benda Pos	4.210.000	4.204.900	5.100,00
	Belanja Perlengkapan Alat Listrik	464.400	52.000	412.400,00
	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Kebersihan	1.000.000	990.250	9.750,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	485.000	391.000	94.000,00
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.469.376	1.469.350	26,00
	Belanja Barang Konsumsi	25.390.000	24.179.500	1.210.500,00
	Belanja Umbul-umbul/Spanduk	3.060.000	3.005.000	55.000,00
	Belanja Pakaian Dinas	6.266.000	6.240.000	26.000,00
	Belanja Honorarium Operator	3.000.000	3.000.000	0,00
	Belanja Insentif Pelayanan Desa (Modin Perempuan, SKD, Pengurus Barang Desa)	6.000.000	6.000.000	0,00
	Belanja Honorarium PKPKD, PPKD, PKD, Bendahara	19.200.000	19.200.000	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000	24.995.000	5.000,00

	Belanja Langganan Listrik	1.780.000	1.762.956	17.044,00
	Belanja Langganan Air Bersih	1.240.000	1.240.000	0,00
	Belanja Langganan Internet	3.360.000	3.360.000	0,00
	Belanja Perpanjangan Ijin Pajak	8.472.000	8.472.000	0,00
	Belanja Servis Peralatan Elektronik dan Listrik	1.000.000	500.000	500.000,00
	Belanja Admin Bank	346.793	260.196	86.597,00
2.1.3	Kegiatan Tunjangan dan Operasional BPD			
	Tunjangan BPD	32.400.000	32.400.000	0,00
	Operasional BPD	14.780.000	14.780.000	0,00
2.1.4.	Kegiatan Operasional RT/RW	28.800.000	28.800.000	0,00
2.1.5.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
	Belanja Printer	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
	Belanja Lemari Besi	2.600.000,00	1.450.000,00	1.150.000,00
	Belanja Lemari Dapur	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.500.000	1.082.000	418.000,00
	Pemeliharaan Bangunan	6.809.739	6.809.500	239,00
2.1.6	Pengelolaan Administrasi Kependudukan			
	Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa	1.344.705,00	1.344.000,00	705,00
	Pengelolaan Administrasi Kearsipan	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00
2.1.7	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan			
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Musyawarah Desa	17.933.168,00	15.200.000,00	2.733.168,00
	Musyawarah Desa Lelangan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perbahan, Laporan APBDesa)	3.950.000,00	2.425.000,00	1.525.000,00
	Inventarisasi Aset Desa	1.495.000,00	1.075.000,00	420.000,00
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD, ILPPD	1.215.000,00	500.000,00	715.000,00
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2.1.8	Penyelenggaraan Lomba Antar Wilayah dan Pengiriman Kontingen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.9	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	13.282.000,00	13.282.000,00	0,00
2.1.10	Lain - Lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
<b>2.2</b>	<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b>1.534.974.700,00</b>	<b>1.533.482.500,00</b>	<b>1.492.200,00</b>
2.2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Perpustakaan Desa	37.286.500,00	37.240.000,00	46.500,00
2.2.2	Pengelolaan Perpustakaan Desa	27.765.000,00	27.555.000,00	210.000,00

2.2.3	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan TPA/MADIN/PAUD/TK			
	PAUD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	TK/RA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	TPQ	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	MADIN	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	MTs	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.4	Penyelenggaraan Belkaga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.5	Penyelenggaraan Posyandu			
	Posyandu Balita	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00
	Posyandu Ibu Balita	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
	Posyandu Kelas Ibu Hamil	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00
	Posyandu Lansia	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
	Posbindu	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.6	Peningkatan Sarana Prasarana Posyandu	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00
2.2.7	Iuran PMI	2.500.000,00	2.420.000,00	80.000,00
2.2.8	Pembangunan Jalan Desa			
	Betonisasi Jalan Ke Arah TPA Sampah	79.063.650,00	79.063.650,00	0,00
	Betonisasi Jalan Poros Desa RT 4 RW 4	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	Betonisasi Jalan Poros Desa RT 1 RW 05	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.2.9	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
	Betonisasi JUT Blok Doropayung	64.597.100,00	64.597.100,00	0,00
	Betonisasi JUT Blok Babatan Kidul	47.795.500,00	47.795.500,00	0,00
2.2.10	Kegiatan Pembangunan Jembatan			
	Pembangunan Jembatan RT 01 RW 05	36.555.800,00	36.555.800,00	0,00
	Pembangunan Jembatan RT 4 RW 5	36.555.800,00	36.555.800,00	0,00
2.2.11	Pembangunan/ Pemeliharaan Saluran Irigasi			
	Normalisasi Saluran Irigasi Persawahan	198.959.500,00	198.939.500,00	20.000,00
	Pembangunan Talud RT 1 RW 1	27.071.500,00	27.071.500,00	0,00
	Pembangunan Talud Sayapan Gorong-gorong Babadan	16.841.500,00	16.841.500,00	0,00
	Pembangunan Gorong-gorong Blok Lurahan	47.407.000,00	47.407.000,00	0,00
	Pembangunan Gorong-gorong RT 02 RW 05	47.407.000,00	47.407.000,00	0,00
	Pembangunan Gorong-gorong Rowo Dukuh	46.273.000,00	46.273.000,00	0,00
2.2.12	Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga			
	Pembangunan Talud Sisi Lapangan	59.691.350,00	59.691.350,00	0,00

	Pengadaan Perlengkapan Olahraga	4.935.700,00	3.800.000,00	1.135.700,00
2.2.13	Pengadaan Pintu Pasar Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.14	Pembangunan RTLH	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
2.2.15	Pembangunan Fasilitas Pembuangan Akhir Sampah	162.138.800,00	162.138.800,00	0,00
2.2.16	Jambanisasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.17	Pengadaan Kendaraan Angkut Sampah	60.560.000,00	60.560.000,00	0,00
2.2.18	Pemeliharaan Penerangan Desa	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
<b>2.3.</b>	<b><u>Bidang Pembinaan Masyarakat</u></b>	<b>110.270.000,00</b>	<b>108.621.000,00</b>	<b>1.649.000,00</b>
2.3.1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan			
	Pelatihan Linmas	7.542.000,00	7.542.000,00	0,00
	Operasional Linmas	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00
2.3.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat, Kebudayaan			
	HUT RI	22.000.000,00	21.401.000,00	599.000,00
	Penyelenggaraan Buka dan Taraweh Bersama	14.228.000,00	14.228.000,00	0,00
	Sedekah Rukun Desa Mutih Kulon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	Sedekah Rukuh Dukuh Kemantren	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	Haul Cikal Bakal Desa Mutih Kulon	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	Takbir Mursal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3.3	Partisipasi Perayaan Hari Besar Lainnya			
	HUT TNI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Hari Santri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.4	Pembinaan Karang Taruna/Klup Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa			
	Pembinaan KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Pembinaan Karang Taruna	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Pembinaan Pramuka	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2.3.5	Pembinaan LKMD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.6	Pembinaan PKK	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
<b>2.4.</b>	<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b>104.930.000,00</b>	<b>104.865.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
2.4.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier Sederhana (MT2)	20.000.000,00	19.999.000,00	1.000,00
	Pelatihan Pembuatan Pakan Fermentasi	14.550.000,00	14.526.000,00	24.000,00
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00
2.4.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			
	Pelatihan Siskeudes	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00

	Pelatihan Brancmarking Inovasi Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
2.4.3	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	8.875.000,00	8.835.000,00	40.000,00
2.4.4	Fasilitasi Kelompok Rentan	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00
<b>2.5.</b>	<b><u>Bidang Tidak Terduga</u></b>	<b>5.821.000,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>2.526.000,00</b>
2.5.1	Penanggulangan Bencana	2.549.624	645.000	1.904.624,00
2.5.2	Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000	2.000.000	0,00
2.5.3	Penanganan Keadaan Mendesak	1.271.376	650.000	621.376,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.314.775.713,00</b>	<b>2.294.097.168,00</b>	<b>20.678.545,00</b>
	SURPLUS/DEFISIT	-26.556.387,00	-4.795.091,00	-21.761.296,00
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	26.556.387,00	26.556.387,00	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>26.556.387,00</b>	<b>26.556.387,00</b>	-
	<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>	-	<b>21.761.296,00</b>	- <b>21.761.296,00</b>

Mutih Kulon, 15 Januari 2020

KEPALA DESA MUTIH KULON



INWANUL FALAH

**PEMERINTAH DESA MUTIHKULON LAPORAN  
KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31  
DECEMBER 2019**

KODE	URAIAN	TAHUN 2019 ( Rp )	TAHUN 2018 ( Rp )
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>ASET</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Aset Lancar</b>		
<b>1.1.1.</b>	<b>Kas dan Bank</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	0,00	0,00
<b>1.1.2.</b>	<b>Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
<b>1.1.3.</b>	<b>Persediaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>Investasi</b>		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Aset Tetap</b>		
1.3.1.	Tanah		
1.3.1.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
1.3.2.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
1.3.3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
1.3.4.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.6.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
1.3.8.		0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

KODE	URAIAN	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)
1	2	3	4
<b>1.4.</b>	<b>Dana Cadangan</b>		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.</b>	<b>Aset Tidak Lancar Lainnya</b>		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>EKUITAS</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Ekuitas</b>		
3.1.1.	Ekuitas	0,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	0,00	0,00
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mutih Kulon, 15 Januari 2020  
KEPALA DESA



INWANUL FALAH

PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

**PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA**

Desa : Mutih Kulon  
Kecamatan : Wedung  
Kabupaten : Demak  
Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Jalan Desa	Swakelola	Jalan Poros Desa RT 04 RW 04 Desa Mutih Kulon	280	meter	Rp 200.000.000	Bantuan Keuangan Provinsi

Mutih Kulon, 15 Januari 2020

Kepala Desa Mutih Kulon



**INWANUL FALAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WEDUNG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON**

Jl. Inspeksi Pengairan No. 1 Mutih Kulon, Kec. Wedung, Kab.  
Demak Kode Pos 59554

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Nomor : 140 /1 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
22. Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2017-2022;
23. Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019;
24. Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Mutih Kulon menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak menjadi Peraturan Desa Mutih Kulon tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2019.

**KEDUA** : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 dengan uraian sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Desa	Rp 2.289.302.077
2. Realisasi Belanja Desa	<u>Rp 2.294.097.168</u>
Realisasi Surplus/Defisit	(Rp 4.795.091)
3. Realisasi Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 26.556.387
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp 26.556.387
<b>SILPA/Silpa Tahun Berjalan</b>	<b>Rp 21.761.296</b>

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Mutih Kulon  
Pada tanggal : 15 Januari 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MUTIH KULON

KETUA  
  
**ACHMAD CHADAD**